

ANALISIS KEBIJAKAN DAN KELAYAKAN MUTU TENAGA PENDIDIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh:

*Asep Mahpudz, Amirudin Kade, Haerudin dkk dan bekerjasama dengan Balitbangda Prop. Sulteng
dan Tim Peneliti Universitas Tadulako Palu¹⁾*

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

Studi analisis kebijakan yang akan dilakukan ini merupakan upaya untuk mengkaji beberapa aspek implementasi arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam aspek kelayakan mutu tenaga pendidik dan penyelenggaraan pendidikan dasar.

Lingkup wilayah kegiatan ini adalah 7 (tujuh Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni : Kabupaten Morowali, Poso, Tojo Unauna, Tolitoli, Donggala, Buol dan Kota Palu. Metode pelaksanaan studi ini dilakukan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif secara deskriptif dalam perspektif emik alamiah, dengan menggunakan teknik survei, studi dokumentasi dan wawancara.

Diperoleh informasi bahwa kompetensi pendidik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya sudah baik, dengan indeks diatas 3 pada beberapa komponen aspek kompetensi. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih membutuhkan penguatan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, terutama pada aspek-aspek tertentu. Hal ini membawa konsekuensi dibutuhkan pengembangan program dan dukungan secara sinergis pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten dan Kota dalam rangka mendukung peningkatan mutu pembangunan pendidikan dasar secara berkesinambungan.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; (3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik,

penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional; (4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan

¹⁾ Staf Pengajar pada FKIP Untad dan kerjasama Balitbangda Prop. Sulteng dan Tim Peneliti Universitas Tadulako Palu.

sesuai dengan potensinya; (8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Pada Penjelasan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan Visi Pendidikan Nasional tersebut selanjutnya dijelaskan kedalam Misi pendidikan nasional, yaitu: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Umum UU No 20/2003).

Seiring dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah telah pula mendorong berkembangnya pemahaman optimal dari masing-masing daerah untuk memiliki sensitivitas sebagai *stakeholders* dalam merancang dan melaksanakan pembangunan pendidikan. Untuk itu, pemerintah perlu menjelaskan dan memperkuat fungsi-fungsi barunya di dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan,

termasuk dalam penetapan kebijakan pendidikan nasional, menentukan standar nasional pendidikan, melakukan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja, serta menumbuhkan harmonisasi dan koordinasi sesuai dengan delegasi urusan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Saat ini telah dikeluarkan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yakni: (1) peningkatan dan penguatan akses pendidikan, (2) peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan, dan (3) peningkatan tatakelola dan citra publik pengelola pendidikan. Ketiga pilar pembangunan pendidikan ini selayaknya menjadi rujukan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Studi analisis kebijakan yang dilakukan ini merupakan upaya untuk mengkaji beberapa aspek implementasi arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam aspek kelayakan mutu tenaga pendidik dan penyelenggaraan pendidikan dasar. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat terutama tentang implementasi arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan kelayakan mutu tenaga pendidik pada penyelenggaraan pendidikan dasar di Provinsi Sulawesi Tengah.

Studi analisis kebijakan pendidikan ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan secara konkret kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat, (2) Mengembangkan alternatif kebijakan dalam meningkatkan kemampuan akademik dan profesional tenaga pendidik sebagai langkah mengembangkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar di Provinsi Sulawesi Tengah, (3) Mengembangkan alternatif kebijakan aspek tatakelola dan manajemen pengelolaan tenaga pendidik secara komprehensif dan sistematis, agar sesuai

dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yakni: (1) peningkatan dan penguatan akses pendidikan, (2) peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan, dan (3) peningkatan tatakelola dan citra publik pengelola pendidikan, sekaligus relevan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan studi ini sejak Bulan Maret 2009 dan selesai September 2009. Lingkup wilayah kegiatan ini adalah 7 (tujuh Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni: Kabupaten Morowali, Poso, Tojo Unauna, Tolitoli, Donggala, Buol dan Kota Palu, mencakup semua wilayah Kecamatan, Dinas Pendidikan Kab/Kota, UPTD pendidikan Kecamatan, dan penyelenggara pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten/Kota lokasi penelitian. Responden dari 7 Kab/Kota dimaksud sebanyak 312 orang.

Metode pelaksanaan studi ini dilakukan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif secara deskriptif dalam perspektif emik alamiah, dengan menggunakan teknik survei, studi dokumentasi dan wawancara.

Tahap pertama, dilakukan studi dokumentasi terhadap sumber bibliografi dan dokumen yang relevan dengan fokus masalah penelitian. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan mengadakan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen, produk kebijakan pendidikan dalam konteks pembangunan pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten sampel. Setelah penelitian tahap pertama dilaksanakan dengan menghasilkan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan penelitian tahap kedua dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian, yakni; pakar pendidikan, pengambil kebijakan di kabupaten/Kota, serta *stakeholders* pendidikan di daerah untuk mengetahui pandangan, pendapat, penilaian terhadap fokus masalah penelitian.

Tahap kedua, dilakukan wawancara kepada subjek penelitian berkenaan dengan pandangan, pemikiran, penilaian subjek terhadap fokus masalah penelitian. Proses wawancara dilakukan dalam rangka

merekonstruksi dan mengkonfirmasi hasil penelitian sementara untuk dikembangkan dalam analisis lebih lanjut sehingga melahirkan rekomendasi kebijakan pendidikan di daerah. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian secara terbuka namun tetap mendasarkan pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara tentatif.

Kedua tahap penelitian ini berlangsung berkesinambungan sampai perolehan data penelitian dianggap memadai. Langkah analisis data penelitian ini mendasarkan pada model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang mengemukakan langkah analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara simultan, yakni; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar di Sulawesi Tengah

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011, kebijakan yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan di Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Pemerataan dan Perluasan Akses

Kebijakan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan terpencil serta daerah pasca konflik maupun hambatan

atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik).

Strategi yang dipilih adalah membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB untuk memperoleh layanan pendidikan. Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Sulawesi tengah diarahkan melalui penguatan program antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Untuk SMP/MTs sederajat diarahkan untuk membaangun Unit Sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan dan buku pelajaran yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar
3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian dan kesetaraan gender
4. Pengembangan pendidikan kesetaraan pada anak usia wajar Dikdas 9 tahun melalui Paket A, Paket B, dan Paket C
5. Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional guna menurunkan penduduk buta aksara 10 – 44 tahun secara signifikan pada akhir tahun 2009. Untuk penuntasan buta aksara diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2010

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan,

standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Tujuan utama pada kebijakan ini adalah mengurangi kesenjangan kualitas sarana dan prasaran, pengelolaan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu dikembangkan kebijakan program antara lain:

1. Memperbaiki sistem pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal ujian nasional dengan benar.
2. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang rusak terutama pada pendidikan dasar
3. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan dan non kependidikan. Prioritas program adalah tercapainya kualifikasi pendidikan guru yang berkompentensi dan profesional pada semua jenjang dan jenis pendidikan minimal S1 /Akta IV
4. Pelaksanaan program pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) melalui pendekatan pendidikan berbaasis luas
5. Meningkatkan pemahaman guru tentang kurikulum berbasis kompetensi dan implementasi dalam proses belajar mengajar

3.2. Gambaran Kompetensi Guru di Sulawesi Tengah (Kabupaten sampel)

Beberapa aspek yang menjadi kajian penelitian dalam aspek kompetensi tenaga pendidik sebagai berikut:

NO	ASPEK	KOMPETENSI PERSONAL
1	A1	DATANG KE SEKOLAH TEPAT WAKTU
2	A2	MENGAJAR DI KELAS TEPAT WAKTU
3	A3	KRITIS TERHADAP TUNUTAN PROFESI GURU
4	A4	MENAMPILKAN DIRI SEBAGAI TELADAN
5	A5	MEMBANGUN MOTIVASI DIRI
6	A6	BERUPAYA MEMECAHKAN MASALAH
7	A7	MENYADARI KEUNGGULAN YANG DIMILIKI
8	A8	MENYADARI KELEMAHAN DIRI SEBAGAI GURU
9	A9	MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SEBAGAI GURU
10	A10	BERUPAYA UNTUK BERUBAH KE ARAH YANG LEBIH BAIK

11	A11	MENINGKATKAN KUALITAS DIRI
12	A12	BERUPAYA MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI
13	A13	MENDAPAT PELUANG UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN
14	A14	MENGAJUKAN USUL KEPADA KEPALA SEKOLAH
15	A15	MENDAPAT RESPON POSITIF TERHADAP USULAN YANG DISAMPAIKAN
16	A16	MENGAJUKAN PENDAPAT DALAM DISKUSI SESAMA GURU
17	A17	MEMBANGUN DISIPLIN KERJA MANDIRI
18	A18	MENYELESAIKAN TUGAS TEPAT WAKTU
19	A19	MEMINATI MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN
20	A20	TANGGAP TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
21	A21	MENDAPAT PENGHARGAAN DARI PIMPINAN
22	A22	MENULIS BUKU/MODUL YANG MENUNJANG PEMBELAJARAN
		RATA-RATA

NO	ASPEK	KOMPETENSI SOSIAL
1	B1	MEMBANGUN KOMUNIKASI DENGAN GURU LAIN
2	B2	BERDISKUSI SESAMA GURU MATA PELAJARAN
3	B3	MENAMPILKAN DIRI DALAM PERGAULAN ANTAR SESAMA GURU
4	B4	BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN LAINNYA
5	B5	AKTIF DALAM KEGIATAN KELOMPOK GURU PROFESIONAL SEPerti PGRI ATAU ORGANISASI GURU LAINNYA
6	B6	MELIBATKAN DIRI DALAM PEMERINTAHAN DESA
7	B7	TENGAP TERHADAP PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT
8	B8	BERPERAN DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH
9	B9	MELAKUKAN KERJA SAMA ANTAR GURU DAN ORANG TUA SISWA
10	B10	MEMBANGUN KOMUNIKASI DENGAN SISWA DI LUAR JAM SEKOLAH
11	B11	BERPERAN DALAM PERTEMUAN DENGAN ORANG TUA SISWA ATAU DENGAN KOMITE SEKOLAH
12	B12	MENGHUBUNGI ORANG TUA DARI SISWA PERWALIAN YANG MENGALAMI MASALAH PENDIDIKAN
13	B13	MELIBATKAN DIRI DALAM KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
14	B14	TAMPIL SEBAGAI TELADAN DALAM KOMUNITAS/LINGKUNGAN TEMPAT KERJA
15	B15	BERPERAN SERTA DALAM KOMUNITAS/LINGKUNGAN TEMPAT KERJA
16	B16	BERDIALOG SESAMA GURU DALAM MENGEMBANG TUGAS PROFESIONAL
17	B17	MENGVALUASI KEBIJAKAN MADRASAH YANG KURANG PRODUKTIF DAN KURANG MENARIK MASYARAKAT
18	B18	MELAKUKAN KRITIK TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN ETOS KERJA GURU

19	B19	MEMBANGUN ETIKA PROFESI KEGURUAN DALAM PERGAULAN
		RATA-RATA

NO	ASPEK	KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN
1	C1	MEMPERSIAPKAN RENCANA PEMBELAJARAN
2	C2	MERENCANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SESUAI DENGAN KURIKULUM
3	C3	MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN BERDASARKAN TUJUAN PEMBELAJARAN
4	C4	MERUMUSKAN TUJUAN INSTRUKSIONAL
5	C5	MENULISKAN SUMBER BAHAN BELAJAR PADA RENCANA PEMBELAJARAN
6	C6	MENYIAPKAN PEKERJAAN RUMAH BAGI SISWA
7	C7	MENYUSUN SOAL EVALUASI SEBELUM PELAJARAN DI MULAI
8	C8	MENETAPKAN METODE PEMBELAJARAN SEBELUM MENGAJAR
9	C9	MENYIAPKAN MEDIA PEMBELAJARAN CiptaAnguru SENDIRI
10	C10	MENYIAPKAN SATUAN PEMBELAJARAN SETIAP KALI TAMPIL DI KELAS
11	C11	MENYIAPKAN BAHAN AJAR YANG DITAMPILKAN DI KELAS SELAMA SATU SEMESTER
12	C12	MEMPERSIAPKAN SUASANA KELAS SEBELUM PELAJARAN DIMULAI
13	C13	MENGENAL KARAKTERISTIK SISWA SEBELUM PEMBELAJARAN
14	C14	MENYESUAIKAN METODE DENGAN MATERI PEMBELAJARAN
15	C15	MENGEMBANGKAN BAHAN PEMBELAJARAN
16	C16	MENGUMPULKAN BUKU-BUKU SUMBER YANG MENUNJANG KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	ASPEK	KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
1	D1	MEMPERSIAPKAN DIRI MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN
2	D2	SIAP MENJELASKAN MATERI YANG DIAJARKAN
3	D3	MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA SISWA PADA SAAT PEMBELAJARAN
4	D4	MEMBUAT VARIASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN AGAR SISWA TIDAK BOSAN
5	D5	MEMEBERI PENGUATAN KEPADA SISWA YANG MENGIKUTI PROSES PEMBELAJARAN DENGAN BAIK
6	D6	MENJADI PEMBIMBING/FASILITATOR DALAM DISKUSI KECIL DI KELAS
7	D7	MENYAJIKAN BAHAN AJAR BERDASARKAN RPP
8	D8	MENGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN YANG SESUAI DENGAN TUJUAN INSTRUKSIONAL
9	D9	MENGUASAI DENGAN BAIK SETIAP BAHAN AJAR YANG DISAJIKAN SETIAP PERTEMUAN
10	D10	MENERAPAKAN METODE PEMBELAJARAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BELAJAR SISWA
11	D11	MENGAJAR DI KELAS SESUAI DENGAN JAM PELAJARAN
12	D12	MENGANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN TERHADAP SISWA

13	D13	MENGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN YANG VARIATIF
14	D14	MENGAJAR DENGAN PENUH SEMANGAT
15	D15	MENERAPKAN MEDIA PEMBELAJARAN SECARA EFEKTIF
16	D16	MENCIPTAKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG MENYENANGKAN
17	D17	KEGIATAN PEMBELAJARAN DIORIENTASIKAN PADA KEGIATAN BELAJAR SISWA
18	D18	KEGIATAN PEMBELAJARAN DILAKSANAKAN DALAM BENTUK KELOMPOK BELAJAR
19	D19	MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA SISWA
20	D20	MENAMPILKAN POLA KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
21	D21	MENGAJAR DENGAN MEMPERHATIKAN MINAT SISWA
22	D22	MENGENAL BAKAT ATAU KECEKIDASAN SETIAP SISWA YANG DIAJAR
23	D23	MEMENFAATKAN SUMBER BELAJAR YANG ADA
24	D24	TAMPIL TERAMPIL DENGAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
25	D25	MEMBIMBING SISWA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR
26	D26	MEMBERITAHUKAN SISWA CARA BELAJAR YANG BAIK DAN BENAR
27	D27	MEMBERIKAN PEKERJAAN RUMAH BAGI SISWA
28	D28	MEMBERIKAN TUGAS KEPADA SISWA
29	D29	MEMNGEMBALIKAN PEKERJAAN/TUGAS SISWA SETELAH DINILAI
30	D30	MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SESUAI DENGAN DESAIN INSTRUKSIONAL

NO	ASPEK	KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM PENILAIAN PEMBELAJARAN
	E1	MENYUSUN KISI-KISI UJIAN
	E2	MENGUASAI TEKNIK EVALUASI UNTUK MEMPEROLEH HASIL PENILAIAN YANG OBYEKTIF
	E3	MENCATAT PERILAKU SISWA SEBAGAI BAGIAN PENILAIAN
	E4	MEMBERI NILAI HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MEMBERI BOBOT DAN SKOR
	E5	MEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/TUGAS YANG DIKERJAKAN SISWA
	E6	MELAKUKAN EVALUASI FORMATIF
	E7	MENGUNAKAN ACUAN PENILAIAN PATOKAN(pap)DALAM MENENTUKAN NILAI EVALUASI
	E8	MENGUNAKAN HASIL RATA-RATA EVALUASI HARIAN DAN EVALUASI AKHIR KENAIKAN KELAS

NO	ASPEK	KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM SIKAP TERHADAP TUGAS
	F1	BERKEINANA TERUS MENJADI GURU
	F2	MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
	F3	MINTA PETUNJUK PIMPINAN BILA MENGALAMI KESULITAN
	F4	MENERAPKAN FUNGSI DAN PERAN GURU SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

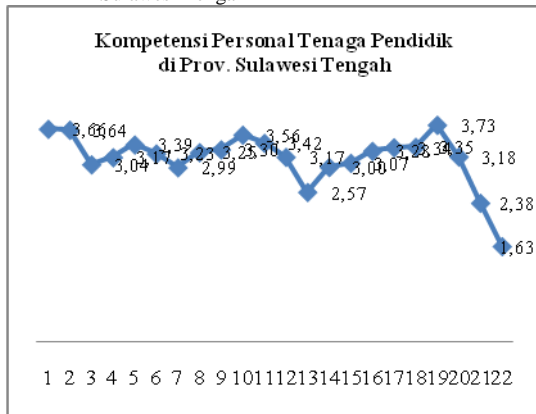
	F5	MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DENGAN MELAKUKAN PERSIAPAN
	F6	MERASA TIDAK PUAS DENGAN KERJA SEBAGAI GURU
	F7	PESIMIS TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU

NO	ASPEK	KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM BIMBINGAN KONSELING (BP)
	G1	MELAKUKAN ANALISIS DIAGNOSTIK TENTANG KESULITAN BELAJAR SISWA
	G2	MEMBIMBING SISWA YANG MENGALAMI KESULITAN BELAJAR
	G3	MANGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA BERSAMA ORANG TUA SISWA
	G4	MENYERAHKAN KESULITAN BELAJAR SISWA KEPADA GURU BIMBINGAN KONSELING

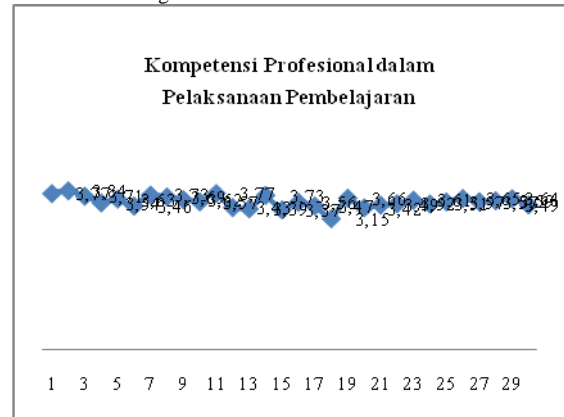
Berdasarkan sebaran kuesioner dan wawancara yang diajukan kepada para guru di wilayah kabupaten sampel, diperoleh informasi yang beragam dan oleh peneliti ditabulasi dan diinterpretasikan sesuai dengan kategori aspek pengembangan. Diperoleh informasi bahwa kompetensi pendidik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya sudah baik, dengan indeks diatas 3 pada beberapa komponen aspek kompetensi, seperti dapat dilihat pada beberapa grafik dibawah ini. Namun demikian terdapat beberapa aspek yang masih membutuhkan penguatan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, terutama pada aspek-aspek tertentu. Hal ini membawa konsekuensi dibutuhkannya pengembangan program dan dukungan secara sinergis pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten dan Kota dalam rangka mendukung peningkatan mutu pembangunan pendidikan dasar secara berkesinambungan.

Dapat diduga jika upaya peningkatan kompetensi ini kurang menjadi perhatian pemerintah daerah, maka langkah peningkatan mutu pembelajaran dapat terabaikan, bahkan cenderung stagnan. Akibatnya akan dapat menjadi beban dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.

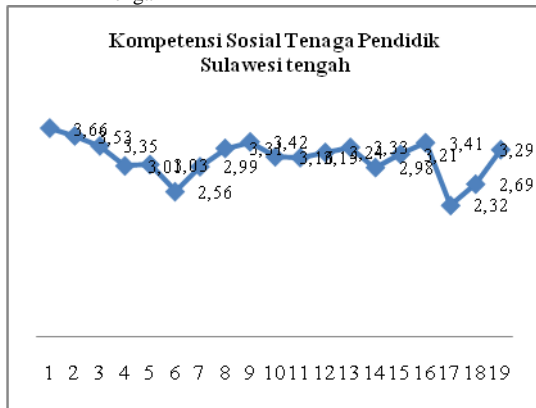
Grafik 1: Kompetensi Personal/kepribadian Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah



Grafik 4: Kompetensi Profesional dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah.



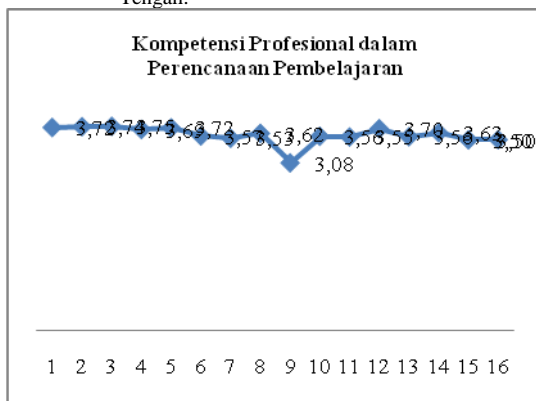
Grafik 2: Kompetensi Sosial Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah



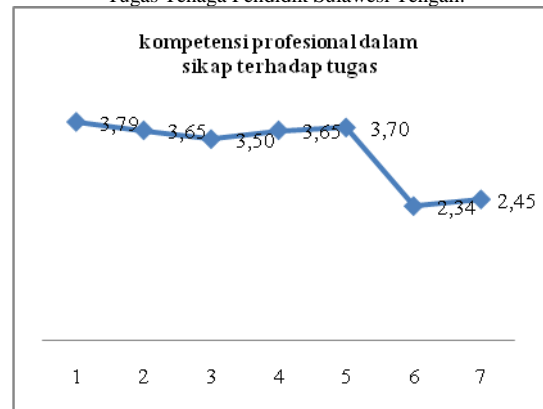
Grafik 5: Kompetensi Profesional dalam Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah.



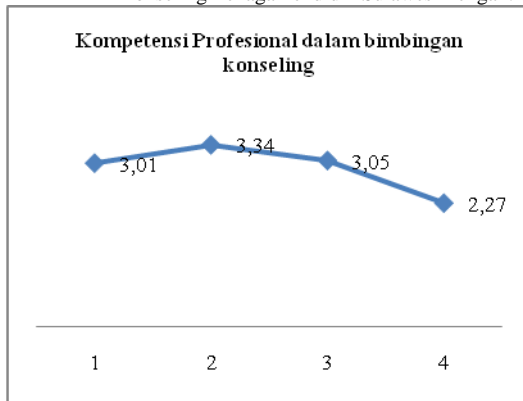
Grafik 3: Kompetensi Profesional dalam Perencanaan Pembelajaran Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah.



Grafik 6: Kompetensi Profesional dalam Sikap terhadap Tugas Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah.



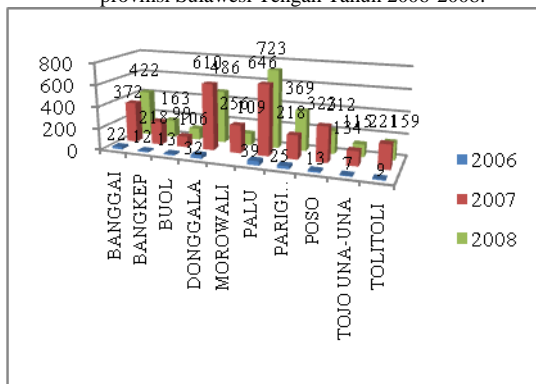
Grafik 7: Kompetensi Profesional dalam Bimbingan Konseling Tenaga Pendidik Sulawesi Tengah.



Tabel 1: Jumlah guru yang sudah disertifikasi di Sulawesi Tengah 2006-2008.

NO.	KABUPATEN	KUOTA TAHUN			TOTAL
		2006	2007	2008	
1	BANGGAI	22	372	422	816
2	BANGKEP	12	218	163	393
3	BUOL	13	99	106	218
4	DONGGALA	32	610	486	1128
5	MOROWALI		256	109	365
6	PALU	39	646	723	1408
7	PARIGI MOUTONG	25	218	369	612
8	POSO	13	323	212	548
9	TOJO UNA-UNA	7	134	115	256
10	TOLITOLI	9	221	159	389
	JUMLAH	172	3097	2864	6133

Grafik 8: Jumlah tenaga Pendidik yang sudah di sertifikasi di provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2008.



3.3. Pengembangan Model Kebijakan Pengelolaan Tenaga Pendidik di Sulawesi Tengah

Merosotnya mutu pendidikan di tanah air, termasuk di Sulawesi Tengah ditandai oleh banyak hal, seperti rendahnya tingkat kelulusan Ujian Akhir Nasional (UN). Mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah guru/tenaga pendidik. Meskipun faktor-faktor lain ikut mempunyai andil dalam merosotnya mutu pendidikan, namun guru dapat dikatakan merupakan salah satu faktor penentu karena gurulah yang secara terprogram berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berbicara tentang guru, tentu tidak dapat terlepas dari citra dan kualitas guru yang semakin memudar.

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak lebih dari dua dasa warsa terakhir, pekerjaan guru tidak menarik lagi, sehingga hanya dipilih oleh mereka yang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidak semua guru seperti itu. Masih banyak guru yang mendedikasikan dirinya dalam bidang pendidikan ini karena memang benar-benar menyadari pentingnya pendidikan dan pentingnya peran guru dalam membina generasi penerus. Namun, kenyataan masih tetap tak terbantahkan, bahwa menjadi guru bukan merupakan pilihan utama putra-putri terbaik bangsa.

Upaya untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional telah dilakukan sejak lama. Namun, baru Tahun 2003 mulai tampak ada tanda-tanda akan terwujudnya profesionalisasi jabatan guru tersebut, mula-mula dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan kemudian, yang paling utama, diberlakukannya UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan.

Namun, masih banyak yang perlu digarap untuk meraih janji-janji tersebut/ mewujudkan profesionalisasi jabatan guru, bukan saja karena kompleksnya masalah yang harus dihadapi, tetapi juga karena terdapatnya distorsi konseptual tentang kompetensi guru dalam PP No. 19/2005,

yang berlanjut dalam UU No. 14/2005. Salah satu upaya yang diamanatkan oleh PP No. 19/2005 dan UU No. 14/2005 dalam menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional untuk meningkatkan citra guru adalah pendidikan profesi yang memungkinkan guru menguasai kompetensi utuh sehingga berpeluang memberikan layanan ahli yang andal yang diharapkan mampu menyumbang kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kepemilikan kompetensi yang tercermin dalam kemampuan memberikan layanan ahli ini akan ditandai dengan pemerolehan Sertifikat Pendidik yang selanjutnya akan diikuti oleh penghargaan berupa tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru sekolah dasar (SD).

Menurut PP No. 19/2005, pasal 29, ayat (2), seorang guru SD/MI minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV, serta sertifikat profesi untuk guru SD/MI. Sehubungan dengan persyaratan ini, perlu segera dirancang program pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2005 dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik maupun pengelolaan. Di samping itu, jumlah, persebaran serta heterogenitas latar belakang guru pendidikan dasar adalah yang paling kompleks di antara guru-guru pada jenjang pendidikan lainnya, sehingga memerlukan penanganan ekstra.

Data perkembangan jumlah guru, dan latar belakang yang sangat bervariasi, baik latar belakang pendidikan, maupun latar belakang sosial budaya. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya pekerjaan yang harus digarap untuk memenuhi amanat undang-undang yang sangat ambisius, yang dalam waktu 10 tahun menargetkan semua pendidik harus sudah memenuhi kualifikasi minimal.

Adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, menuntut adanya kesiapan pemerintah daerah dalam menanganikebijakan pengelolaan tenaga pendidik secara terencana, terprogram dan sistemik. Terdapat beberapa aspek yang selayaknya dikembangkan oleh Pemerintah

daerah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi. Antara lain:

1. Menjamin terlaksananya masyarakat gemar belajar (*learning society*)
2. Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga tanpa diskriminasi
3. Menjamin terlaksananya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun
4. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kota yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
5. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak terlantar
6. Meningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal sesuai jenjangnya dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
7. Mengembangkan sistem manajemen, pengembangan akademik, pembinaan ketenagaan, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang ada
8. Berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya alokasi anggaran pendidikan di kabupaten dan kota serta provinsi, selayaknya mulai dikembangkan upaya kebijakan antara lain:

1. Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD untuk pembangunan sektor pendidikan.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggungjawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraan
3. Dengan pertimbangan tertentu pemerintah daerah dapat mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

4. Alokasi bantuan pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, dan prospek pengembangan satuan pendidikan.

Upaya memperkecil disparitas mutu pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, mempunyai nilai strategis bagi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas. Untuk secara komprehensif mewujudkannya, permasalahan disparitas perlu dibagi menjadi tahap-tahap pengelolaan sistim pembelajaran, manajemen mutu, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan mutu pembelajaran di sekolah merupakan upaya yang dapat dilakukan melalui suatu program yang didasarkan pada transformasi nilai-nilai dalam budaya mutu antara sekolah. Melalui sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diupayakan mengikuti nilai-nilai yang disepakati.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perancangan pengelolaan tenaga pendidik di Sekolah diarahkan pada mengubah pola pengelolaan tenaga pendidik di sekolah, dari "tertutup" ke pola 'terbuka' berupa kerjasama pemberdayaan. Model Transformasi Budaya Mutu diantara tenaga pendidik/guru antar Sekolah dapat dirumuskan dengan menyertakan pada kegiatan yang akan dilakukan. Secara komprehensif pelaksanaan program sinergi tenaga pendidik antar sekolah dan wilayah mengikuti model dengan setiap siklus menggambarkan tahapan dari program.

Komponen utama dalam Model sinergi tenaga pendidik di Sekolah adalah: (1) Orientasi Program mutu guru di sekolah, (2) melakukan verifikasi rencana aksi dan tindakan di sekolah mitra (kategori baik) atau benchmark, (3) Review Rencana Kaji Tindak berdasarkan hasil verifikasi di sekolah mitra atau workshop hasil benchmark serta penyusunan rencana tindak, dan (4) Implementasi Rencana Tindak peningkatan mutu dan kompetensi guru di sekolah yang dikembangkan. Keempat tahap kegiatan dalam program sinergi tenaga pendidik antar sekolah ini dapat

dikembangkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

Langkah program sinergi tenaga pendidik antar sekolah terdiri atas 3 tahapan dengan setiap tahap terdiri atas beberapa komponen langkah. Setiap tahapan merupakan siklus. Tahap I: Pengelolaan Sistim Pembelajaran, pada tahap pertama ini dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan perubahan yang pendidik terapkan dalam pengembangan diri dan pembelajaran di sekolah ke arah Sistem Manajemen Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah. Tahap II: Manajemen Mutu. Pada tahap ini peserta telah memiliki pengalaman dalam mengelola diri dan pengembangan pembelajaran di sekolah, dan belajar dari pengalaman implementasi tahap I untuk menerapkan dan mengakselerasi Sistem Manajemen Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah. Tahap III: Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahap ketiga ini kembali dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap inovasi pembelajaran yang mereka kembangkan dan diterapkan dalam pengembangan sekolah berupa Sistem Manajemen Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah.

IV. PENUTUP

Program pengelolaan tenaga pendidik semakin strategis di masa depan, sehingga membutuhkan komitmen, kensekuensi dan system yang jelas, terukur dan akuntabel. Adanya program yang selama ini dikembangkan seperti sertifikasi Guru, peningkatan kualifikasi pendidikan guru merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki dan meningkatkan kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, sikap yang harus dibangun dari para guru dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan sertifikasi ini adalah meningkatkan profesionalisme, kualitas, mengenal dan menekuni profesi keguruan, meningkatkan kualitas keguruan, mau belajar dengan meluangkan waktu untuk

menjadi guru, merasa nyaman dan bangga sebagai guru dalam menjalankan tugas kependidikan.

Konsekuensi logis dari hal ini maka akan dibutuhkannya pengembangan program dan dukungan secara sinergis stakeholders

pendidikan di Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten dan Kota dalam rangka mendukung peningkatan mutu pembangunan pendidikan dasar secara berkesinambungan, termasuk pengelolaan tenaga pendidik secara terencana, terprogram, dan sistemik.